

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menjadi kata kunci untuk melihat kondisi suatu bangsa. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) 2004 yang dihimpun Depdiknas (2005:16-17), dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun, baru 7,2 juta (25,3%) yang memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kemudian Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah mencapai 96,8% dan 83,5%. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 3,2% anak usia 7-12 tahun dan sekitar 16,5 anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu APS penduduk usia 16-18 tahun sudah mencapai 53,5% dan partisipasi penduduk usia 19-24 tahun di perguruan tinggi mencapai 14,6%. Berdasarkan informasi Balitbang Depdiknas, semakin tinggi tingkat pendidikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, ternyata angka partisipasinya semakin rendah (*Kompas*, 6/2/02; Mastuhu, 2003:1).

Fakta pendukung lainnya menggambarkan bahwa anak-anak usia sekolah tingkat dasar di Indonesia yang melanjutkan ke tingkat lanjutan ternyata relatif sedikit dibandingkan negara-negara maju lainnya di Asia Tenggara. Laporan UNFPA (Data Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa) bertajuk keadaan penduduk dunia 2005: janji kesetaraan, kesetaraan jender, kesehatan reproduksi dan tujuan pembangunan milenium menyatakan jumlah usia sekolah dasar di Indonesia yang melanjutkan ke jenjang lanjutan hanya sedikit lebih baik dibandingkan Kamboja, Laos dan Myanmar (*Bisnis Indonesia*, 1/11/05).

Penyebab angka partisipasi pendidikan formal yang rendah dapat diidentifikasi dari temuan Suryadi (2000) sebagaimana tercantum dalam Grafik 1. Riset Suryadi menunjukkan terdapat hubungan yang sangat nyata antara variabel wilayah di Indonesia dengan variabel alasan tidak bersekolah sekaligus membuktikan bahwa persentase terbanyak mengenai alasan mereka tidak bersekolah adalah karena kesulitan biaya.

Grafik 1 Alasan Penduduk Tidak Bersekolah (Usia 7 Tahun Ke Atas)



Sumber: diolah dari Riset Suryadi, 2000.

Data BPS pada tahun 2003 juga menunjukkan bahwa sebagian besar (76%) keluarga menyatakan penyebab utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah (67%) serta harus bekerja dan mencari nafkah (8,7%) (Depdiknas, 2005). Dengan demikian faktor kesulitan biaya menjadi faktor dominan yang menghambat masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan secara wajar.

Sebagaimana dapat diketahui dari temuan Abbas Ghozali dkk (2004)—sebagai kajian terhadulu (*prior research*)—bahwa para orang tua mesti menanggung jenis Satuan Biaya Pendidikan (SBP) yang relatif banyak, antara lain: 1) buku dan ATS; 2) pakaian dan perlengkapan sekolah; 3) akomodasi; 4) transportasi; 5) konsumsi; 6) kesehatan; 7) karyawisata; 8) uang saku; 9) kursus; 10) iuran sekolah; dan 11) *forgone earning* (Abbas Ghozali, et.al.:2004 dalam Ki Supriyoko: 2005). Beban SBP ini dirasakan berat oleh para orang tua terutama berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Ki Supriyoko (2005) menjelaskan bahwa SBP yang dibayar pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ternyata relatif kecil kontribusinya terhadap SBP-K (Keseluruhan) yakni hanya berkisar 10-40% dari nilai ril SBP-K.

Sementara itu temuan terdahulu lainnya oleh Dedi Supriadi, dkk. (2004:234) meski dengan rincian satuan biaya pendidikan yang agak berbeda dengan kajian Ki Supriyoko menunjukkan hal yang sama yakni beban biaya

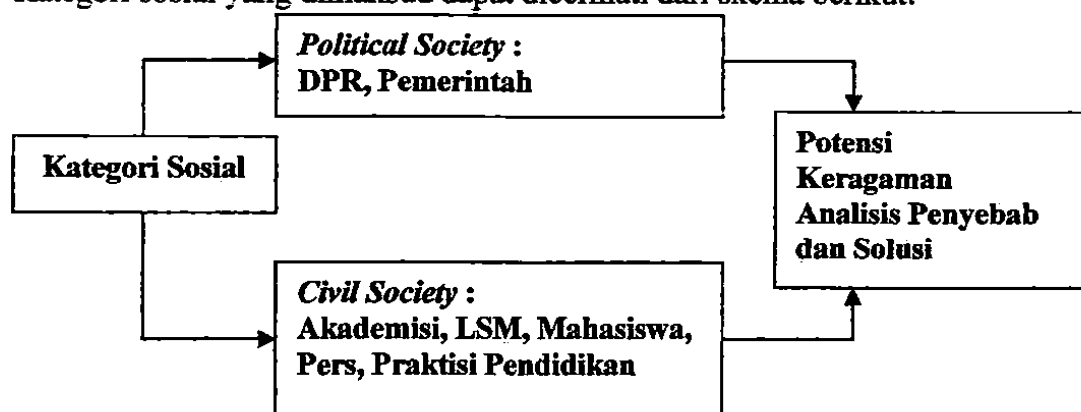
yang ditanggung keluarga terlalu tinggi dibandingkan biaya yang ditanggung pemerintah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Keadaan Jumlah Biaya Riil Tiap Siswa Per Tahun

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Biaya Minimum Per Siswa	Keadaan Jumlah Biaya Saat Ini		
			Pemerintah	Keluarga	Lainnya
1.	SDN	1.325.465 (100%)	32%	67%	0,4%
2.	SLTPN	2.744.605 (100%)	19,7	80%	0,3%
3.	SMUN	3.552.269 (100%)	21,2%	78,4%	0,4%
4.	SMKN	3.468.318 (100%)	30,3%	68,2%	1,5%

Relatif rendahnya SBP yang dibayar oleh pemerintah itu yang mengkondisikan biaya pendidikan menjadi mahal bagi masyarakat kebanyakan. Adapun konsep pendidikan mahal dengan meminjam definisinya Ki Supriyoko (2005) di sini adalah pendidikan dengan biaya satuan pendidikan yang dibayar oleh orang tua siswa adalah tinggi, baik secara relatif maupun secara mutlak.

Terhadap fakta pendidikan mahal ini akan muncul berbagai analisis tentang faktor penyebab mahalnya pendidikan di Indonesia. Perbedaan analisis tersebut juga sangat dimungkinkan terjadi berdasarkan segmen atau kategori sosial antara lapis politik (*political society*) dan lapis masyarakat (*civil society*). Kategori sosial yang dimaksud dapat dicermati dari skema berikut:



Skema 1 Kategori Sosial dan Potensi Keragaman Analisis

Studi mengenai analisis penyebab dan solusi terhadap fakta pendidikan mahal di Indonesia dari sejumlah unsur sosial yang berbeda tersebut akan berimbas pada tawaran solusi yang beragam pula. Akhir dari itu semua diharapkan akan terjadi pola penyelesaian pembananan bersifat akomodatif

integratif dan partisipatif antara arus *political mainstream* dan *social mainstream* yang selama ini cenderung bersifat saling menolak dan menohok antara satu dengan yang lain.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang perlu dirumuskan dan dianalisis secara memadai berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah berkaitan dengan kristalisasi, formulasi dan sistematisasi keragaman pemikiran atau pendapat mengenai analisis sebab dan solusi atas pendidikan mahal di Indonesia. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak dipecahkan adalah :

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pendidikan mahal di Indonesia?
2. Apa solusi yang semestinya diajukan untuk mengatasi pendidikan mahal tersebut?

Selanjutnya aspek-aspek yang diteliti dapat diskemakan sebagai berikut:

Skema 2
Aspek-Aspek Yang Diteliti



Muatan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Fakta Pendidikan Mahal adalah keadaan nyata tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia; 2) Faktor Penyebab adalah alasan-alasan logis dan empiris atau hal-hal yang menyebabkan pendidikan di Indonesia menjadi mahal; dan 3) Solusi yakni tawaran penyelesaian baik secara teoritik atau praktis untuk mengatasi pendidikan